

**Judul** : Tunjangan profesi guru dibahas lebih dalam  
**Tanggal** : Selasa, 20 September 2022  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 13

## Tunjangan Profesi Guru Dibahas Lebih Dalam

*Masukan konstruktif dan visioner dari masyarakat diyakini akan menjadikan RUU Sisdiknas bisa menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin dinamis.*

**FAUSTINUS NUA**  
[faustinus@mediaindonesia.com](mailto:faustinus@mediaindonesia.com)

**K**EMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menegaskan akan membahas masalah tunjangan profesi guru dan dosen yang sudah dituangkan dalam revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) bersama DPR.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud-Ristek Anindito Aditomo mengungkapkan pihaknya siap membahas masukan masyarakat bersama DPR. "Kami terbuka menerima masukan masyarakat terkait perbaikan RUU Sisdiknas. Salah satunya adalah usulan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) agar tunjangan pro-

fesi guru maupun tunjangan profesi dosen tertuang di dalam RUU Sisdiknas," ujarnya.

Pemerintah sangat mengapresiasi masukan konstruktif dari ICMI tersebut. Semua masukan yang dilandasi niat perbaikan akan dipertimbangkan dalam pembahasan bersama DPR pada tahap selanjutnya. Pemerintah saat ini tengah berusaha agar RUU Sisdiknas bisa masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk segera dibahas dan disahkan.

Menurut Anindito, sejauh ini sudah banyak masukan dari berbagai organisasi masyarakat, khususnya terkait pendidikan. Selain melakukan dialog atau diskusi secara tatap muka, Kemendikbud-Ristek juga sangat terbuka dengan menyediakan *website* resmi.

"Banyak sekali, silakan dicek catatannya di laman

[sisdiknas.kemdikbud.go.id](http://sisdiknas.kemdikbud.go.id)," imbulnya.

Berdasarkan pantauan *Media Indonesia*, laman tersebut mencantumkan naskah, proses pembahasan, artikel, tanya jawab, hingga masukan terkait RUU Sisdiknas.

Dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi X DPR, kemarin, Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI) Junaidi menyampaikan keberadaan Dewan Pendidikan dinilai sangat penting sehingga pihaknya mendukung pemerintah yang mempertahankannya dalam RUU Sisdiknas.

Dewan Pendidikan selama ini dinilai telah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan sekaligus berfungsi mengevaluasi dan mengawasi jalannya kebijakan pendidikan di Tanah Air. Aturan terkait Dewan Pendidikan sejatinya telah ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Pasal 8 dan dipertegas kembali pada Pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan peran masyarakat penting untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

### Rapor pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan, Kemendikbud-Ristek juga menghadirkan rapor pendidikan bagi siswa, khususnya satuan pendidikan lewat asesmen nasional (AN). Rapor pendidikan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membenahi sekolah dari berbagai sisi.

"Bagi bapak ibu di dinas pendidikan, rapor pendidikan akan mempercepat melihat sekolah-sekolah mana yang perlu dibantu," kata Anindito dalam Sosialisasi Rapor Pendidikan dengan Fitur Otomasi PBD untuk Perencanaan BOS dan BOP 2023.

Disebutkan, salah satu perbaikannya ialah mengenai kemampuan literasi numerasi siswa. Rapor pendidikan memberikan gambaran terkait literasi dan numerasi di satuan pendidikan.

Selain itu, rapor pendidikan dapat mendeteksi sekolah rawan perundungan. Hal itu dapat dijadikan dinas pendidikan sebagai modal intervensi penyelesaian masalah. ([Medcom.id/H-1](http://Medcom.id/H-1))